

LEMBARAN DAERAH PROPINSI
DAERAH TINGKAT I JAWA BARAT

No. 22

1983

SERI D.

PERATURAN DAERAH TINGKAT I PROPINSI
JAWA BARAT

NOMOR : 4 TAHUN 1983

TENTANG :
POLA PEMBINAAN KEPARIWISATAAN JAWA BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA BARAT;

- MENIMBANG :
- a. bahwa pengembangan Kepariwisataaan adalah merupakan salah satu upaya untuk pemeratakan pembangunan di Daerah dalam rangka mengisi otonomi yang nyata dan bertanggungjawab;
 - b. bahwa dengan telah diserahkannya sebagian urusan Kepariwisataaan kepada Daerah Tingkat I Jawa Barat berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1979 perlu segera mengambil langkah-langkah dalam pembinaan pelaksanaannya;
 - c. bahwa pokok-pokok pembinaan dan pengembangan Kepariwisataaan di Daerah Jawa Barat yang telah ditetapkan melalui Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat No. 17/PD-DPRD/70 sudah tidak sesuai, oleh karena itu perlu disempurnakan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf b dan c di atas dipandang perlu untuk segera menetapkan kembali Pola Pembinaan Kepariwisataaan Jawa Barat.
- MENGINGAT :
- 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Jawa Barat;
 - 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1979 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah dalam bidang Kepariwisataaan kepada Daerah Tingkat I;
 - 4. Keputusan Bersama Menteri Perhubungan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 292/HK-205/Phb/79
- Nomor 208/1979
tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan

Pemerintah Nomor 24 Tahun 1979 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah dalam bidang Kepariwisata kepada Daerah Tingkat I;

5. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor 18/Dp.040/PD/79 tentang Pola Dasar Pembangunan Daerah Jawa Barat;

6. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor 5 Tahun 1980 tentang Pembentukan Dinas Pariwisata Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat;

7. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor 5 Tahun 1981 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pariwisata Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat.

DENGAN PERSETUJUAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA BARAT.

MEMUTUSKAN:

MENETAPKAN : PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA BARAT
TENTANG POLA PEMBINAAN KEPARIWISATAAN JAWA BARAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. "Pemerintah Daerah" adalah Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat;
- b. "Daerah" adalah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat;
- c. "Gubernur Kepala Daerah" adalah Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat;
- d. "Peraturan Daerah" adalah Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat tentang Pola Pembinaan Kepariwisata Jawa Barat;
- e. "Kepariwisata" adalah keseluruhan kegiatan Pemerintah Daerah, dunia usaha dan masyarakat yang ditujukan untuk menata kebutuhan perjalanan dan persinggahan wisatawan.

BAB II

INTEGRITAS PEMBINAAN

Pasal 2

- (1) Untuk dapat memperoleh kebulatan hubungan yang menyeluruh, maka sistematika Pola Pembinaan Kepariwisata Jawa Barat disusun

sebagai berikut :

BAB IPENDAHULUAN.

BAB IIPOKOK-POKOK PEMBINAAN KEPARIWISATAAN JAWA BARAT.

BAB IIIPOKOK-POKOK PELAKSANAAN PEMBINAAN KEPARIWISATAAN JAWA BARAT.

BAB IVPENUTUP.

(2) Isi bawerta uraian naskah Pola Pembinaan Kepariwisataaan Jawa Barat merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 3

Pelaksanaan Pola Pembinaan ini dilakukan melalui koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi antar instansi, Lembaga Pemerintah maupun swasta yang erat kaitannya dengan kepariwisataan.

BAB III

PENUTUP

Pasal 4

Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor 17/PD-DPRD/1970 tentang Pokok-pokok Pembinaan dan Pengembangan Kepariwisataaan di Daerah Propinsi Jawa Barat dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 5

(1) Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak hari dan tanggal diundangkan.

(2) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur lebih lanjut dalam Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah, sepanjang mengenai pelaksanaannya.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat.

Bandung, 23 Pebruari 1983

DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH
PROPINSI DAERAH
TINGKAT I JAWA BARAT;
Ketua,

E. SURATMAN

GUBERNUR
KEPALA DAERAH TINGKAT I
JAWA BARAT,

ttd.

H.A. KUNAEFI

Peraturan Daerah ini disahkan oleh Menteri Dalam Negeri dengan Surat Keputusan tanggal 23 Nopember 1983 Nomor 556.32-730 atau telah dianggap disahkan berdasarkan pasal 69 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 tahun 1974.

MENTERI DALAM NEGERI,

ttd.

H. SOEPARDJO RUSTAM

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat, tanggal 1 Desember tahun 1983 Nomor 22 Seri D.

SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH
TINGKAT I JAWA BARAT

ttd.

Drs. H. KARNA SUWANDA

NIP. 010008026

POLA PEMBINAAN KEPARIWISATAAN JAWA BARAT

BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang.

Hakekat Pembangunan Nasional adalah pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dalam rangka mewujudkan masyarakat sejahtera, adil dan makmur berdasarkan Pancasila.

Kepariwisata adalah faktor potensial di dalam usaha pembangunan Nasional menyeluruh dan merata.

Kepariwisata Jawa Barat adalah faktor potensial untuk mencerminkan identitas Jawa Barat yang terpuji, sehingga lahir daripadanya kebanggaan Nasional.

Kepariwisata Jawa Barat adalah potensi Pembangunan Daerah, sebagai salah satu sumber pendapatan dan kesejahteraan masyarakat Jawa Barat.

Jawa Barat dengan lingkungan hidupnya yang religius, ramah, someah hade ka semah, bermanfaat, indah dan mencintai keindahan, adalah potensi utama bagi dayaguna dan hasilguna kepariwisataan; oleh karenanya pembinaan kepariwisataan perlu dilaksanakan secara selaras dan terpadu, di atas Pola Pembinaan Kepariwisata Jawa Barat sebagai landasan berfikir dan bekerja.

2. Pengertian.

a. Pola Pembinaan Kepariwisata Jawa Barat adalah pedoman dasar berfikir, dan bekerja yang baku berdasarkan kebijaksanaan Pemerintah Daerah dalam membina Kepariwisata di Jawa

Barat.

b. Pembinaan Kepariwisata Jawa Barat adalah daya upaya untuk menumbuhkan, mengembangkan dan melestarikan daya guna dan hasil guna kepariwisataan di Jawa Barat, yang dititik beratkan kepada pengembangan dan promosi wisatawan Dalam Negeri, sebagai titik tolak untuk merangsang arus bagi wisatawan Luar Negeri.

3. Maksud.

Pola Pembinaan Kepariwisata Jawa Barat dimaksudkan untuk memberi arah yang sesuai dengan aspirasi masyarakat Jawa Barat sebagai landasan berpikir dan bekerja Pemerintah, dunia usaha dan masyarakat.

4. Landasan.

Pola Pembinaan Kepariwisata Jawa Barat disusun berdasarkan landasan idiil Pancasila, landasan Konstitusional UUD 1945 dan landasan Operasional Garis-Garis Besar Haluan Negara dan Pola Dasar Pembangunan Daerah Jawa Barat.

5. Penuangan Pokok-pokok Kebijakan.

Untuk memberikan landasan gambaran mengenai wujud masa depan pembinaan Kepariwisata Jawa Barat, Pola Pembinaan Kepariwisata Jawa Barat disusun sebagai berikut :

- a. Pokok-pokok Pembinaan Kepariwisata Jawa Barat.
- b. Pokok-pokok Pelaksanaan Kepariwisata Jawa Barat.

BAB II

POKOK-POKOK PEMBINAAN KEPARIWISATAAN JAWA BARAT

1. Tujuan.

Tujuan Pembinaan Kepariwisata di Jawa Barat adalah menumbuhkan rasa cinta tanah air, kebanggaan tanah air, rasa persaudaraan antar daerah/bangsa, mengenal keindahan alam, seni budaya, daerah dan lebih terpeliharanya keseimbangan lingkungan hidup, perluasan kesempatan kerja serta peningkatan pendapatan masyarakat/daerah.

2. Ruang Lingkup.

Ruang lingkup pembinaan Kepariwisata Jawa Barat meliputi : Penelitian dan Perencanaan di bidang produk wisata, pemasaran dan partisipasi masyarakat, pengaturan, pengawasan, penyediaan fasilitas dan kemudahan, serta ketenaga kerjaan sepanjang menurut perundang-undangan yang berlaku menjadi urusan Daerah.

3. Strategi Pembinaan.

Pengembangan Kepariwisata Jawa Barat dititik beratkan kepada Pengembangan Wisata Dalam Negeri sebagai titik tolak bagi pertumbuhan wisata Luar Negeri.

4. Arah Pembinaan.

Arah Pembinaan kepariwisataan Jawa Barat, adalah sebagai berikut :

- a. Pemerintah Daerah, di dalam kegiatan pembinaan dan pengembangan Kepariwisata bertindak sebagai pendorong, pembimbing, pengarah, pengendali dan pemberi kemudahan-kemudahan, sedangkan kegiatan pelaksanaannya dilakukan oleh masyarakat.
- b. Pembinaan dan Pengembangan Kepariwisata dilaksanakan secara merata di seluruh wilayah Jawa Barat. Pelaksanaannya bertahap, dengan menempatkan daerah-daerah yang telah berkembang menjadi pusat penyebaran untuk pengembangan daerah-daerah di sekitarnya, dengan memperhatikan segi-segi ekonomi, sosial budaya, moral, keagamaan, keamanan, pendidikan dan lingkungan hidup yang serasi dan seimbang.
- c. Pembinaan dan pengembangan kepariwisataan, diselenggarakan secara terpadu berdasarkan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi di dalam semangat tenggang rasa dan saling menghormati.
- d. Kegiatan pembinaan dan pengembangan kepariwisataan dilaksanakan dengan menggunakan langkah-langkah penelitian yang meliputi perencanaan, penggalan, penyelamatan, perawatan, pemugaran, evaluasi, pemasaran dan monitoring.
- e. Dalam melaksanakan kegiatan pembinaan dan pengembangan kepariwisataan sebanyak mungkin mengikutsertakan tenaga ahli dari Perguruan Tinggi dan kalangan masyarakat.
- f. Segala rencana dan program kegiatan pembinaan kepariwisataan dituangkan dalam suatu Rencana Induk (Master Plan) Kepariwisata Jawa Barat.

5. Sarana Pembinaan.

Sarana Pembinaan Kepariwisata meliputi :

- a. Penataan dan kesamaan bahasa mengenai tujuan, ruang lingkup, strategi dan arah pembinaan Kepariwisata di lingkungan Pemerintah Daerah, dunia usaha dan masyarakat.
- b. Penataan dan penyempurnaan produk hukum yang bersangkutan dengan kepariwisataan hingga terjadi keterikatan hukum di

dalam pelaksanaan pembinaan kepariwisataan.

- c. Penataan dan pematapan kelembagaan kepariwisataan untuk tercapainya tujuan pembinaan kepariwisataan.
 - d. Perencanaan, pembinaan, pengembangan dan pengarahan tenaga kerja kepariwisataan yang lebih berdayaguna dan berhasilguna untuk meningkatkan mutu pelayanan jasa.
 - e. Terciptanya Rencana Induk (Master Plan) Pembangunan Kepariwisata di Jawa Barat dan Rencana Uraianya (Detail Plan) yang terarah dan terpadu.
 - f. Pengarahan sumber dana yang lebih berdaya guna dan berhasil guna serta usaha penggalian sumber baru yang dapat diikuti sertakan di dalam kegiatan Kepariwisata.
 - g. Tersedianya prasarana dan sarana Kepariwisata yang memadai sesuai dengan upaya peningkatan kegiatan Kepariwisata.
 - h. Tumbuhnya kesadaran wisata di kalangan masyarakat Jawa Barat hingga tumbuh rasa turut memiliki, rasa turut serta dan rasa turut bertanggungjawab terhadap Pembangunan Kepariwisata Jawa Barat.
 - i. Terciptanya citra Kepariwisata Jawa Barat, yang terpuji.
 - j. Pemasaran obyek wisata Jawa Barat dengan memperhatikan nilai-nilai kelestarian, keaslian dan keserasian.
 - k. Peningkatan pendidikan dan latihan pelayanan dalam bidang jasa Kepariwisata dan penyuluhan kepada masyarakat untuk mencapai "Sadar Wisata".
6. Alat Kelengkapan Pembinaan.
- a. Lambang Kepariwisata merupakan ungkapan visual tentang Kepariwisata Jawa Barat.
 - b. Lembaga Pendidikan dan latihan merupakan sarana bagi tenaga kerja yang bergerak di bidang Kepariwisata, dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan jasa Kepariwisata.
 - c. Study kelayakan, penataan dan design setiap usaha yang termasuk ruang lingkup Otonomi Daerah dan tugas pembantuan dalam bidang Kepariwisata merupakan wahana untuk pengembangan Kepariwisata.
 - d. Organisasi-organisasi profesi yang berhubungan dengan Kepariwisata merupakan sarana penunjang bagi pembangunan Kepariwisata Jawa Barat.
 - e. Mekanisme dan organisasi kerja para penyelenggara Pemerintah Daerah, dunia usaha dan masyarakat dalam bidang

kepariwisataan adalah merupakan sarana bagi terciptanya tujuan Pembinaan Kepariwisata Jawa Barat.

BAB III

POKOK-POKOK PELAKSANAAN PEMBINAAN KEPARIWISATAAN JAWA BARAT

Pembinaan Kepariwisata Jawa Barat dilaksanakan secara bertahap, merata, menyeluruh dan terpadu.

Tahapan pelaksanaan tersebut, tercermin di dalam kegiatan Pelita dan Program Tahunan, sehingga keseluruhan rangkaian kegiatan tersebut merupakan suatu kesatuan yang seimbang, selaras dan serasi.

Lokasi pembinaan diupayakan tersebar di seluruh Jawa Barat, seiring dengan aspek pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya.

Titik berat pembangunan Kepariwisata di Jawa Barat didasarkan kepada perumusan yang tercermin dalam Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) bidang Kepariwisata dan Pola Dasar Pembangunan Jangka Panjang Jawa Barat Sub Sektor Pariwisata.

BAB IV

PENUTUP

Berhasilnya usaha-usaha kegiatan di bidang Kepariwisata di Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat pada akhirnya tergantung pada unsur pelaksana baik aparat Pemerintah, dunia usaha Kepariwisata maupun peran serta masyarakat dalam menyambut tantangan pembangunan untuk turut mewujudkan Ketahanan Nasional dan Peningkatan kesejahteraan masyarakat di Jawa Barat.